Prosiding

Konferensi Nasional Sosiologi V

Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
Padang, 18-19 Mei 2016

GERAKAN SOSIAL DAN KEBANGKITAN BANGSA

Tim Editor :

Elfitra, M.Najib Azca, Syafruddin,
M.Ridhah Taqwa, Vina Salviana S, Indraddin

Kerjasama :

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

VOLUME II

Prosiding
KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
Padang 18 – 19 MEI 2016

**GERAKAN SOSIAL
DAN KEBANGKITAN BANGSA**

Tim Editor:

Elfitra (Universitas Andalas)
M. Najib Azca (Universitas Gadjah Mada)
Syafuruddin (Universitas Mataram)
M. Ridhah Taqwa (Universitas Sriwijaya)
Vina Salviana S. (Universitas Muhammadiyah Malang)
Indraddin (Universitas Andalas)

e-ISBN:

ISBN: 978-602-99467-03
978-602-99467-2-7 (jil. 2)

Kerjasama:

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Diterbitkan Oleh:

Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Andalas
2016

DARI AKSI DEMONSTRASI KE NEGOSIASI : Strategi Penguatan Gerakan Pedagang Korban Bencana Pasar Raya Padang Oleh PBHI Sumbar

Firdaus

Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat
daus_gila@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas pertama polarisasi gerakan sosial yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Raya Padang dalam mempertahankan akses terhadap ruang ekonomi di Pasar Raya Padang pasca bencana 2009. Kedua, strategi penguatan gerakan pedagang yang dilakukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dalam mendampingi gerakan pedagang mempertahankan akses mereka terhadap ruang ekonomi di Pasar Raya Padang pasca bencana 2009 yang masih berlangsung sampai artikel ini ditulis. Pola gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang adalah dalam bentuk pertama aksi massa. Aksi massa dilakukan dalam bentuk demonstrasi dan protes. Kedua negosiasi yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah kota. Negosiasi dilakukan melalui mediasi dan hearing. Ketiga kampanye yang dilakukan melalui perluasan isu dan kampanye media massa. Strategi penguatan yang dilakukan oleh PBHI Sumbar terhadap pedagang dalam melakukan gerakan sosial adalah melalui peningkatan kapasitas SDM pedagang dan strategi organisasi. Tulisan ini dirangkum dari catatan pengalaman lapangan penulis selama melakukan pendampingan terhadap pedagang. Beberapa data lainnya diambil dari dokumen tertulis yang tersedia di PBHI Sumbar.

1.PENDAHULUAN

Ribuan orang bergerak dengan berjalan kaki dari Pasar Raya Padang menuju rumah dinas walikota Padang pada tanggal 10 Februari 2010. Mereka terdiri dari pedagang & buruh angkat Pasar Raya Padang, korban bencana gempa 2007, supir angkot, mahasiswa dan warga kota lainnya yang tergabung dalam Forum Warga Kota (FWK). Panjang barisan dalam *longmarch* mampu menghubungkan orang pertama di rumah dinas walikota Padang di Jl. Ahmad Yani dengan orang terakhir di Pasar Raya Padang yang berjarak lebih kurang 2.5 km itu. Mereka adalah pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang kebijakan pembangunan di kota Padang. Aksi masa ini merupakan rentetan dari protes warga terhadap pembangunan ulang Pasar Raya Padang pasca gempa 2009 yang kemudian berkembang ke isu pembangunan kota lainnya. Tuntutan mereka dalam aksi demonstrasi tersebut adalah relokasi kios sementara di Pasar Raya Padang, pembayaran dana bantuan gempa tahun 2007 dan pengadaan terminal angkutan kota di Pasar Raya Padang (Kontras, 2/3/2010)⁴⁹⁶.

Aksi massa yang berlangsung sampai siang itu dipenuhi dengan orasi menyampaikan protes atas kebijakan pembanguna kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Dalam orasi mereka menyampaikan protes dan tuntutan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat. Di penghujung, unjuk rasa berujung ricuh dan termpurung kelapa beterbangan ke arah rumah dinas walikota Padang. Seperti aksi-aksi unjuk rasa di televisi, aparat

⁴⁹⁶ <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1015> Siaran Pers: Surat laporan Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh Poltabes Padang. Diunduh tanggal 12 Mei 2016

kepolisian membubarkan paksa demonstran –yang mayoritas perempuan- dengan menyemprotkan air menggunakan mesin *water canon* pada kerumunan pengunjung rasa yang memenuhi sepanjang jalan Ahmad Yani dari pertigaan Jl. Sudirman hingga pertigaan permindo. Aksi demonstrasi ini menjadi aksi demonstrasi terbesar di kota Padang –dalam pengamatan penulis- dan melibatkan banyak orang dan kelompok yang juga lebih banyak.

Dalam literatur ilmu sosial, aksi massa atau unjuk rasa merupakan bagian dari strategi gerakan sosial. Menurut Piotr Sztompka, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka (Sztompka, 2012:325). Lebih lanjut, Tarrow (1994) sebagaimana dikutip oleh Klandermans mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, lawan dan penguasa. Tarrow menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut a). Menyusun aksi mengacau (*disruptive*) melawan kelompok elit, penguasa, kelompok-kelompok lain dan aturan-aturan budaya tertentu, b) Dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elit, c) Berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif, dan d) Terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial (Klandermans, 1997: xiii).

Sebagai sebuah gerakan sosial, dengan mengacu pada pandangan Sztompka & Tarrow, maka aksi massa dan demonstrasi yang dilakukan oleh warga kota Padang dalam menentang pembangunan kota tentu bukanlah sebuah gerakan yang sporadik tanpa latar belakang isu kolektif dan nir-lembaga yang menjadi support atas aksi kolektif mereka. Sebagai tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elit, penyebab protes yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi adalah kebijakan pembangunan pasar raya padang pasca gempa 2009 yang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang Firdaus (2014). Sebagai sebuah gerakan sosial yang terorganisir, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang berada di bawah naungan Forum Warga Kota (FWK) yang di dalamnya terdapat organisasi-organisasi paguyuban pedagang berdasarkan tempat dan jenis dagangan mereka.

Pasca aksi besar tanggal 10 Februari 2010, beberapa orang aktivis FWK dan pedagang ditangkap oleh Polresta Padang berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Sekda kota Padang atas kerusakan pos satpam dan lampu taman rumah dinas walikota yang dilakukan oleh pengunjung rasa pada tanggal 10 Februari. Dalam rilis KontraS tanggal 2 Maret 2010, disebutkan bahwa 5 orang aktivis FWK dan pedagang ditahan oleh Polresta Padang dan 20 orang lainnya terancam dan merasa tidak aman sehingga meninggalkan kota Padang untuk mencari perlindungan (kontras.org). Pasca penahanan terhadap aktivis FWK dan beberapa orang pedagang, gerakan sosial warga kota dalam bentuk aksi massa mengalami penurunan. Untuk mendampingi aktivis FWK dan pedagang yang ditahan oleh Polresta Padang, mereka memberikan kuasa hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Oleh PBHI Sumbar, kuasa hukum tidak hanya diterima dari mereka yang ditahan oleh Polresta Padang, tapi juga dari pedagang lainnya yang merasa terancam keamanannya.

Setelah PBHI Sumbar menerima kuasa hukum dari pedagang pasca penangkapan pedagang dalam aksi demonstrasi bersama FWK tanggal 10 Februari 2010 gerakan sosial pedagang mengalami perubahan. Gerakan protes dalam bentuk demonstrasi mulai berkurang. Selain karena takut, energi pedagang banyak tersedot untuk mendampingi 6 anggota mereka yang ditahan oleh kepolisian (Firdaus, 2014 :37-38). Bahkan, tidak ada aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang bersama PBHI Sumbar. Khusus untuk 6 orang yang ditahan polisi, PBHI Sumbar melakukan pendampingan di pengadilan. Kemudian untuk pedagang lainnya, banyak strategi yang dilakukan oleh PBHI dalam mendampingi gerakan sosial pedagang Pasar Raya Padang. Tulisan ini akan

membahas strategi-strategi pendampingan yang dilakukan oleh PBHI Sumbar dalam melakukan penguatan gerakan sosial yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Raya Padang pasca bencana 2009. Tulisan ini juga akan membahas polarisasi gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang Pasar Raya Padang dalam mempertahankan akses terhadap ruang ekonomi di Pasar Raya Padang pasca bencana 2009.

2.TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai masalah sosial yang pasca bencana gempa tahun 2009, terutama di Pasar Padang telah banyak studi yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan peneliti. Studi-studi yang tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Dalam pendekatan sosial, lebih spesifik dalam perspektif gerakan sosial antara lain dilakukan oleh Suryanto pada tahun 2011. Suryanto menfokuskan studinya pada strategi yang dilakukan oleh Forum Warga Kota (FWK) dalam memperjuangkan kepentingannya terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang terkait pembangunan kios darurat di Pasar Raya Padang. Dalam laporan penelitiannya, Suryanto menemukan bahwa FWK menggunakan strategi formal dan strategi demonstrasi. Strategi formal dilakukan oleh FWK dengan melakukan berbagai pertemuan resmi dengan lembaga pemerintah Kota Padang. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut mereka menyampaikan kepentingan mereka secara resmi. Strategi demonstrasi dilakukan oleh FWK yaitu aksi-aksi dan tindakan perlawanan pada pemerintah Kota Padang. Aksi perlawanan tersebut dilakukan dengan cara demonstrasi dan kekerasan. Startegi yang digunakan oleh FWK menurut Suryanto berhasil dengan dikabulkannya tiga tuntutan mereka oleh DPRD Kota Padang dengan membentuknya tim penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan kembali Pasar Raya Padang (Suryanto, 2011).

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Fidel tahun 2011. Fidel menfokuskan studinya pada kontribusi FWK sebagai gerakan sosial dalam proses demokratisasi di Kota Padang. Temuan Fidel cukup menarik dimana FWK dengan basis masa yang luas, terdiri dari pedagang korban bencana Pasar Raya Padang, Korban Gempa Tahun 2007 (bantuannya tidak disalurkan oleh Pemko Padang), Warga Teluk Sirih (Korban kasus pencaplokan paksa tanah), Warga Kurao Pagang (Korban Kasus pencaplokan paksa tanah), Warga Pasia Nan Tigo (Korban kasus manuggal Jalan BSD, namun FWK belum berkontribusi terhadap demokratisasi di Kota Padang. Hal ini menurut Fidel karena gerakan sosial yang dilakukan oleh FWK hanya berkontribusi dalam mobilisasi massa yang kurang efektif. Dalam gerakannya, FWK tidak melakukan fungsi pendidikan politik, isu-isu politik dan pemantauan terhadap kebijakan pemerintahan. Gerakan sosial FWK juga tidak berkelanjutan dan hanya berjalan di awal munculnya Gerakan sosial dan selanjutnya gerakan sosial yang dilakukan oleh FWK bertentangan dengan masyarakat pedagang. Di internal lembaga, persaingan untuk mendominasi dan mengedepankan kepentingan pribadi terjadi antara elit mereka. Meskipun mobilisasi massa yang dilakukannya terus berlangsung, namun penyesuaian antara elit dan massa tidak terjadi, sehingga menimbulkan polarisasi elite dan massa dan kemudian menimbulkan demokrasi yang tidak terkonsolidasi dan demokrasi yang semu (Fidel, 2011).

Studi yang berbeda dengan dua studi di atas dilakukan oleh Ira Ariesta pada tahun 2014. Dalam studinya, Ariesta menfokuskan perhatian pada partisipasi, kekuatan dan kelemahan perempuan dalam proses resolusi konflik dengan kerangka matriniial Minangkabau. Konflik yang terjadi di Pasar Raya menurut Ariesta adalah konfrontasi kepentingan antara pemegang otoritas dan kepentingan bukan pemegang otoritas. Berdasarkan analisis kepentingan itu, Ariesta menyimpulkan bahwa konflik bersifat materialistis. Pedagang menuntut perubahan kebijakan politik pemerintah yang merugikan mereka secara ekonomi. Di sisi lain, tuntutan pemerintah Kota Padang juga bersifat

materialistis dimana pedagang diharapkan membayar harga kios yang ditetapkan jika pembangunan selesai dilakukan dan selalu berupaya mempertahankan *status quo* melalui alat negaranya. Dalam penyelesaian konflik, perempuan yang terlibat berasal dari lembaga pemerintah, perempuan dari LSM, perempuan dari kelompok mahasiswa dan perempuan dari pedagang. Secara umum peran perempuan dalam proses resolusi konflik tersebut kecil. Bahkan tindakan kolektif yang dilakukan perempuan sebagai bentuk perannya dalam proses resolusi konflik justru membawa mereka menjadi korban kekerasan. Dan ketika proses resolusi konflik dilakukan secara formal melalui perundingan, perempuan tidak lagi berperan dan mengikuti proses tersebut (Ariesta, 2014).

Dua tulisan yang diuraikan di atas, lebih menekankan pada gerakan sosial FWK dalam studi mereka, sementara studi terakhir menekankan pada partisipasi perempuan dalam proses resolusi konflik. Meskipun sama-sama melihat objek yang sama di Pasar Raya Padang, namun ketiga studi ini melihat dengan sudut pandang berbeda. Suryanto lebih melihat strategi gerakan FWK, Fidel lebih melihat kontribusi gerakan FWK dalam proses demokratisasi, sementara Ariesta melihat gerakan perempuan. Tulisan penulis dalam paper ini akan berfokus pada strategi penguatan gerakan pedagang oleh PBHI Sumatera Barat.

3.METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari studi penulis sejak terlibat dalam proses advokasi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang bersama-sama dengan PBHI Sumatera Barat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang sebagian besarnya diperoleh bersamaan dengan keterlibatan penulis dalam proses advokasi tersebut. Meskipun menjadi bagian dalam proses advokasi, sebagai peneliti penulis tetap melihat data secara objektif. Proses pengumpulan data sendiri berlangsung bersamaan dengan keterlibatan penulis dan juga dokumen-dokumen PBHI Sumbar terkait dengan persoalan Pasar Raya Padang. Data yang disajikan dalam paper ini telah penulis analisis dengan menggunakan pendekatan Miles & Huberman (1992), dimana data yang begitu banyak penulis verifikasi sesuai tujuan penulisan untuk kemudian disajikan dalam paper ini.

4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN

POLARISASI GERAKAN PEDAGANG PASAR RAYA PADANG

Mengamati dinamika dan perkembangan pasar di kota Padang, terdapat benang merah yang bisa ditarik dari tulisan Colombijn (2006). Dalam tulisannya yang meskipun tidak spesifik tentang pasar, Colombijn menulis bahwa rata-rata pemicu awal perubahan pasar di kota Padang dimulai dari bencana kebakaran di pasar tersebut. Pasar Gadang, Pasar Tanah Kongs, Pasar Belakang Tangsi dan Pasar Kampung Jawa (*sekarang Pasar Raya* pen) pernah mengalami bencana kebakaran. Pasca bencana kebakaran tersebut berbagai perubahan terjadi di pasar tersebut. Kini, Pasar Raya Padang juga mengalami dinamika dan melahirkan banyak persoalan karena dampak bencana gempa tahun 2009 yang merobohkan beberapa bangunan yang merupakan fasilitas pasar.

Kebijakan pembangunan kios darurat pasca bencana telah menjadi titik awal munculnya protes dari pedagang. Ditambah kemudian kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III, IV dan fase VII (Firdaus, 2014). Protes terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pedagang tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas yang melibatkan warga kota lainnya. Mengikuti perkembangan yang ada, secara umum gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang Pasar Raya Padang dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama gerakan bersama APPR, fase kedua gerakan bersama FWK, dan fase ketiga gerakan bersama PBHI Sumbar. Pola gerakan yang

dilakukan oleh pedagang mulai dari gerakan bersama APPR hingga gerakan bersama PBHI Sumbar terdiri dari dua pola, yaitu demonstrasi dan negosiasi.

Gerakan Demonstrasi

Gerakan demonstrasi dilakukan oleh pedagang sejak awal penolakan terhadap kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasar pasca bencana, yaitu pembangunan kios darurat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang pada mulanya lebih bersifat reaktif terhadap perkembangan-perkembangan pembangunan. Dalam artian, gerakan tersebut lebih banyak bersifat penentangan dan perlawanan. Dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang dalam gerakan awal, mayoritas tujuannya adalah untuk menentang dan menolak kebijakan dan kegiatan pembangunan pasar setelah bencana. Meskipun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapat penentangan dari pedagang melalui aksi demonstrasi, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan kios darurat melebihi jumlah pedagang yang menjadi korban bencana.

Dalam perkembangan berikutnya, gerakan yang dilakukan oleh pedagang –karena pemerintah tetap melanjutkan kebijakan- beralih dari bentuk penolakan ke bentuk permintaan. Dalam tuntutan, pedagang meminta pemerintah membongkar bangunan kios yang sudah dibangun di Pasar Raya Padang. Permintaan-permintaan tersebut mereka sampaikan ke lembaga legislatif kota Padang dan juga ke Balaikota Padang. Dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang, orasi-orasi yang mereka sampaikan juga terkadang tidak terkontrol, lalu mengeluarkan kata-kata sumpah serapah dengan menyebutkan walikota dalam berbagai pengandaian yang tidak layak disebutkan.

Aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa terus dilakukan oleh pedagang pasar. Setelah kemudian mereka bergabung dengan FWK, aksi demonstrasi meluas dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat korban pembangunan kota lainnya. Kelompok tersebut adalah Warga Korban Gempa Tahun 2007 (bantuannya tidak disalurkan oleh Pemko Padang), Warga Teluk Sirih (Korban kasus pencaplokan paksa tanah), Warga Kurao Pagang (Korban Kasus pencaplokan paksa tanah), Warga Pasia Nan Tigo (Korban kasus manunggul Jalan BSD II) (Fidel, 2011:7, Firdaus, 2014). Keseluruhan kelompok masyarakat yang merasa korban pembangunan kota ini kemudian menyumbang jumlah massa dalam aksi-aksi demonstrasi selanjutnya. Puncak demonstrasi terbesarnya adalah pada tanggal 10 Februari 2010. Setelah itu, beberapa aksi demonstrasi masih berlangsung, tapi tidak dalam jumlah besar seperti pada tanggal 10 Februari 2011. Setelah tanggal 16 Februari 2010 tidak ada lagi aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan oleh pedagang karena pengaruh ditangkapnya 6 orang aktivis FWK dan pedagang oleh Polresta Padang atas tuduhan pengrusakan fasilitas rumah dinas walikota pada aksi demonstrasi tanggal 10 Februari 2010. Pasca penangkapan 6 orang aktivis FWK dan pedagang, energi pedagang dan FWK banyak tersedot untuk mendampingi aktivis mereka yang ditahan di kepolisian dan mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Padang.

Gerakan Negosiasi

Gerakan negosiasi dilakukan oleh pedagang sejak bergabung dengan FWK. Pedagang kerap melakukan berbagai negosiasi dengan pemerintah (legislatif dan eksekutif) dalam penyelesaian pembangunan di Pasar Raya Padang. Negosiasi pada awal gerakan dan setelah bergabung dengan FWK terutama dilakukan dalam bentuk dialog di penghujung aksi unjuk rasa. Dalam dialog, pedagang diwakili oleh beberapa orang perwakilan untuk berdialog dengan anggota legislatif atau walikota. Selain perwakilan pedagang, pengurus FWK juga turut mendampingi pedagang dalam proses dialog-dialog tersebut. Perkembangan berikutnya, negosiasi yang dilakukan oleh pedagang setelah didampingi oleh PBHI Sumbar dilakukan dalam bentuk hearing dan dengar pendapat dengan legislatif.

Selain dengan legislatif, pedagang juga melakukan hearing dan dengar pendapat dengan eksekutif, terutama dengan dinas pasar.

Dalam kegiatan hearing dan dengar pendapat, pedagang tidak hanya melakukan hearing dengan legislatif di tingkat kota, tapi juga melakukan hearing dengan legislatif di tingkat propinsi dan bahkan dengan anggota legislatif di DPR RI yang berkunjung ke Sumbar. Dalam dialog-dialog tersebut, kemudian isu terus berkembang sehingga menjadi isu bersama di tingkat lokal dan nasional. Puncak dari gerakan dalam bentuk negosiasi yang dilakukan oleh pedagang adalah disepakatinya poin-poin mediasi antara pedagang dengan pemerintah kota yang ditandatangani oleh Walikota Padang pada tahun 2011. Sampai tulisan ini ditulis, hasil mediasi inilah yang menjadi pijakan pedagang pasar dalam mengadvokasi diri mereka untuk pemenuhan hak-haknya sebagai korban bencana, pedagang dan warga kota.

Gerakan Kampanye

Sebuah gerakan sosial harus didukung oleh komponen –orang dan lembaga- yang banyak agar suatu gerakan menjadi gerakan bersama. Dalam upaya perluasan isu dan mendapatkan dukungan yang banyak, gerakan kampanye dilakukan oleh pedagang melalui media massa cetak dan elektronik. Sejak awal gerakan penolakan, nyaris setiap hari pemberitaan gerakan pedagang dimuat oleh media cetak dan elektronik. Setiap perkembangan isu dan gerakan, dipublish ke media massa melalui realisasi atau konferensi pers. Berita-berita yang dipublish dan dikeluarkan media massa tersebut kemudian menjadi konsumsi publik dan diperbincangkan di berbagai ruang publik.

Momentum terbesar yang dimanfaatkan oleh pedagang dalam melakukan kampanye gerakan mereka adalah kekerasan saat pembongkaran yang dilakukan di hari raya Idul Fitri tahun 2010. Dalam momentum tersebut, digambarkan bagaimana kekerasan yang dialami oleh pedagang-pedagang perempuan yang dilakukan oleh aparat saat pembongkaran. Aksi kekerasan pada hari raya tersebut kemudian menjadi perhatian publik yang lebih luas, sehingga kemudian dukungan dari berbagai kalangan untuk pembangunan Pasar Raya Padang sesuai dengan kebutuhan pedagang menguat. Dukungan tersebut diperoleh dari tokoh-tokoh individu dan lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Pernyataan dukungan tersebut kemudian dilaksanakan di pasar dengan dihadiri oleh mereka yang ikut mendukung gerakan pedagang. Momentum ini yang kemudian menjadi pintu masuk untuk melaksanakan mediasi.

STRATEGI PENGUATAN GERAKAN PEDAGANG OLEH PBHI SUMBAR

Sejak PBHI Sumbar menerima kuasa dari individu pedagang, gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang berubah ke bentuk gerakan advokasi, yaitu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan (Faqih, 2000). Sebagaimana prinsip gerakan advokasi, PBHI Sumbar dalam upaya penguatan gerakan pedagang menempatkan diri sebagai fasilitator yang mendampingi keinginan-keinginan pedagang sesuai dengan kebutuhan mereka terhadap ruang ekonomi di Pasar Raya Padang. Proses pendampingan sekaligus dilakukan untuk memberdayakan kekuatan yang dimiliki oleh pedagang. Dalam proses penguatan pedagang ini prinsip-prinsip *people centred, participatory, empowering* dan *sustainable* sebagaimana pola pemberdayaan yang diperkenalkan Chambers (1987:199). Dalam proses penguatan gerakan pedagang dengan pendekatan advokasi untuk pemberdayaan, PBHI Sumbar melakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan organisasi pedagang.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Meskipun tidak menyatakan secara langsung, dalam proses penguatan pedagang tampaknya PBHI Sumbar sepakat dengan Notoatmodjo (2009) yang yang memilih bahwa sumber daya manusia lebih penting dalam proses pembangunan. Hal inilah yang kemudian dikembangkan oleh PBHI Sumbar, bahwa mustahil gerakan sosial dilakukan dengan tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Secara umum, pedagang adalah orang-orang yang terbiasa di pasar dengan kalkulasi untung rugi dalam prinsip perdagangan. Hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak mereka dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut nyaris tidak mereka fahami dengan baik. Dalam konteks ini PBHI kemudian melakukan penguatan dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di pasar.

Peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh PBHI Sumbar melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dengan materi tentang hak-hak mereka sebagai korban bencana sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang Bencana, sebagai pedagang dan sebagai warga negara. Kegiatan penyuluhan dilakukan hampir setiap malam di kantor PBHI Sumbar. Semua pedagang yang sudah memberikan kuasa pada PBHI Sumbar diminta hadir untuk mengikuti penyuluhan. Dalam setiap penyuluhan, peserta adalah pedagang sesuai dengan kelompok organisasi mereka. Selain penyuluhan, kepada pedagang juga diberikan pengetahuan tentang pentingnya organisasi dan bagaimana melakukan advokasi terhadap hak-hak mereka.

Selain penyuluhan tentang hak-hak sebagai korban bencana, pedagang dan warga negara –pada awal memberikan kuasa- peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan dalam setiap kali muncul isu dan perkembangan baru dalam proses pembangunan pasar. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk pembekalan strategi-strategi yang akan dilakukan dalam proses advokasi. Dalam proses pembekalan, materi tentang hak-hak disisipkan untuk menambah pengetahuan pedagang terkait hak mereka. Tidak hanya pengetahuan, dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah –seperti lobby, hearing dan mediasi- seluruh pedagang dilibatkan secara individu dan kelompok. Keterlibatan mereka tidak hanya sebatas perwakilan, namun langsung pedagang tersebut, dengan demikian mereka memiliki pengalaman dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah.

Penguatan Organisasi

Sebuah gerakan sosial sejatinya terorganisir dengan baik untuk tujuan bersama, yaitu perubahan sosial. Gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang Pasar Raya Padang sejak awal memang dilakukan di bawah organisasi yang menaungi mereka, yaitu organisasi berdasarkan kelompok paguyuban mereka. Kemudian, organisasi-organisasi tersebut bergabung dengan Aliansi Pedagang Pasar Raya (APPR). Setelah bergabung dengan APPR kemudian mereka bergabung dengan FWK. Namun, setelah bergabung dengan APPR dan FWK, tidak ada upaya penguatan yang sistematis terhadap organisasi pedagang. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian PBHI Sumbar.

Dalam upaya penguatan organisasi, PBHI Sumbar mengharuskan pedagang menjadi bagian dari kelompok organisasi sesuai dengan paguyuban mereka di pasar. Dalam hal ini, segala urusan pedagang disampaikan melalui perwakilan organisasi mereka, dan perwakilan organisasi tersebut yang kemudian menyampaikan pesan untuk berbagai pertemuan dan kegiatan. Fungsi organisasi pedagang dioptimalkan sebagai sumber arus informasi dan kegiatan, sehingga dengan demikian eksistensi organisasi di tengah pedagang lebih nyata. Dalam pelaksanaan kegiatan negosiasi, baik dalam bentuk hearing, lobby dan mediasi, seluruh pedagang dilibatkan dan arus informasi disampaikan melalui pimpinan organisasi mereka.

5.KESIMPULAN

Gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang Pasar Raya Padang dalam mendapatkan hak mereka sebagai pedagang korban bencana sejak tahun 2009 merupakan gerakan sosial terlama dan terus berlangsung hingga tulisan ini ditulis. Gerakan mereka sekaligus menjadi gerakan sosial yang paling banyak melibatkan publik, baik lembaga maupun individu. Sebagai sebuah gerakan sosial warga, gerakan pedagang telah melahirkan berbagai pola dan strategi. Keterlibatan PBHI Sumbar dalam memperkuat gerakan pedagang telah merubah pola gerakan pedagang dari gerakan aksi massa ke gerakan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan mediasi antara pedagang dan pemerintah kota. Sebagai sebuah gerakan sosial, hasil mediasi tentu bukanlah tujuan, namun hanya instrumen untuk mencapai tujuan perubahan kebijakan yang lebih luas. Pekerjaan yang lebih utama untuk keberlanjutan gerakan tersebut adalah mengawal terlaksananya hasil mediasi.

6.DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Ira, 2014. *Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Nomor 2, Volume I, Tahun 2014. Hal. 41-51.
- Colombijn, Freek, 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Faqih, Mansour, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fidel, 2011. *Kontribusi Fwk Sebagai Gerakan Sosial Dalam Demokratisasi Di Kota Padang*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas. Padang.
- Firdaus, 2014. *Protes Korban Bencana; Studi Konflik Penanggulangan Bencana di Pasar Raya Kota Padang*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Nomor 2, Volume I, Tahun 2014. Hal. 27-39.
- Kalndermans, Bert, 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Miles, Matthew. B & A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta.
- Notoadmodjo, Soekidjo, 2009. *Pengembangan Suber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryanto, 2011. *Strategi Kelompok Kepentingan Memperjuangkan Kepentingannya Dalam Konflik Forum Warga Kota (FWK) Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padang*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas. Padang.
- Sztompka, Piotr, 2006. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada, Jakarta